



HUT PEMKOT JOGJA

Terlecut Hasil Evaluasi BPK

JOGJA - Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut Pemkot Jogja berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Predikat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ pada Selasa (30/5) tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2016.

Bagi Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, capaian prestasi tersebut menjadi pemacu semangat bagi jajarannya untuk terus menunjukkan kinerja terbaik selaku abdi negara, sekaligus pelayanan masyarakat. »

► Baca Terlecut... Hal 7



Penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan pemkot dalam menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat.”

Haryadi Suyuti, Wali Kota Jogja



WTP- Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (empat dari kiri) usai menerima penghargaan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah 2016, Selasa (30/5).

Tertantang Proses Pemeriksaan Keuangan yang Kian Rumit

■ TERLECUT...

Sambungan dari hal 1

Hal itu sebagai modal positif dalam peringatan HUT ke-70 Pemkot Jogja. Sebagaimana diketahui, opini WTP hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menyusun dan menyajikan LKPD dengan standar tertinggi dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah.

"Hasil ini tentu saja harus bisa memotivasi seluruh organisasi perangkat daerah di Pemkot Jogja," katanya kemarin (6/6).

HS, sapaannya, bertekad menjadikan capaian tersebut sebagai standar penyampaian laporan keuangan dari pemkot di masa yang akan datang. "Penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan pemkot dalam menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat," ujar HS.

HS menegaskan, sudah sepatutnya pengelolaan keuangan daerah disusun secara hati-hati. Agar semua kegiatan terdokumentasi dengan rapi. Terlebih di era perkembangan teknologi informasi saat ini. Dimana pemkot mencanangkan

konsep *smart city* untuk Kota Jogja. Dengan begitu seluruh dokumen pemerintahan tak sekadar berbentuk fisik. Tapi juga terdokumentasi digital.

"WTP merupakan bagian perwujudan *e-government* yang tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran tertib secara administrasi," kata HS.

Sementara Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) berharap keberhasilan meraih opini WTP kali ini bisa diperluas cakupannya. Dan direplikasikan dalam kegiatan internal pemkot. Penilaian dilakukan dalam pemeriksaan semua proses pengeluaran dan pendapatan. Baik administrasi hingga evaluasi. "Hasil pemeriksaan internal juga akan kami umumkan ke publik. Supaya masyarakat tahu dan bisa ikut mengawasi," ucapnya.

Hal itulah yang mendorong HP menerapkan proses pemeriksaan internal layaknya BPK hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk pelaksanaannya, HP menginstruksikan inspektorat daerah untuk menyiapkan sistem penilaian manajemen keuangannya.

Dengan konsep tersebut, HP optimistis, kinerja pegawai kelurahan dan kecamatan akan lebih baik dan transparan dalam manajemen keuangan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kadri Renggono mengatakan, keberhasilan meraih opini WTP tak semudah membalik telapak tangan. "Setiap tahun kami merasa pemeriksaan yang dilakukan BPK semakin detail. Mungkin tahun depan pemeriksaan akan semakin ketat dan rumit," katanya.

Kadri menyebut, unsur pemeriksaan meliputi kecukupan pengungkapan informasi keuangan daerah, penyusunan laporan sesuai standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Terkait hal tersebut Kadri mengklaim telah menjalankan sistem informasi keuangan daerah dalam penggunaan anggaran. Tanpa melalui sistem, kata Kadri, anggaran tidak bisa dilairkan. Pelaksanaan *e-budgeting* juga menjadi salah satu alat bantu agar pengelolaan anggaran bisa lebih transparan. (pra/yog/ ga)

Pti Kepala

Substantive

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005